

## Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Kecamatan Terhadap Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mewujudkan Efektifitas Pencapaian Program Kerja Pemerintah Kecamatan

Deni Sugiani<sup>1</sup>, Aceng Ulumudin<sup>2</sup>, Dody Hermana<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

<sup>1</sup>24091122023@pasca.uniga.ac.id

<sup>2</sup>aceng.ulumudin@uniga.ac.id

<sup>3</sup>doddy.hermana@uniga.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Fokusnya adalah menganalisis dampak pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan terhadap koordinasi pemerintah kecamatan dalam mencapai efektivitas program kerja lembaga pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif analisis dengan alat ukur menggunakan skala perbedaan semantik dan validitas serta reliabilitas diuji menggunakan korelasi Product Moment dari Pearson. Penelitian melibatkan 100 responden yang dipilih secara sampling. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan analisis statistik dengan rumus analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan, koordinasi pemerintah kecamatan, dan efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah mencapai kriteria yang baik. Temuan hipotesis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kecamatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap koordinasi dan efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah. Koefisien Determinasi menunjukkan pengaruh besar implementasi kebijakan kecamatan terhadap koordinasi dan efektivitas program kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Hubungan antar variabel menunjukkan pengaruh yang nyata.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kebijakan, Koordinasi.

### 1. Pendahuluan

Kecamatan, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, bertanggung jawab kepada Bupati atau Kepala Daerah, dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Dalam struktur organisasi, Kecamatan terdiri dari lima anggota, termasuk unsur pimpinan seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan, seorang Camat memegang peran penting dalam pengawasan, koordinasi, dan kewenangan residu, yang sebagian diwakilkan oleh Bupati/Walikota. Pentingnya izin pelimpahan dari Bupati adalah untuk memastikan pembangunan yang efektif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan kewenangan di tingkat pemerintahan ditentukan oleh struktur dan fungsi yang mendasari rumusannya.

Dua jenis kewenangan, yaitu atributif dan delegatif, dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai peran Pemerintah Kecamatan, namun pelayanan terhadap masyarakat tetap diutamakan. Interaksi yang intens antara pembuat kebijakan dan fenomena yang dihadapi menghasilkan kebijakan pemerintah. Partisipasi massa juga didorong untuk mencapai hasil terbaik. Namun, regulasi yang berubah belum mencerminkan dukungan politik yang kuat untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintahan kecamatan. Fenomena Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan menekankan pentingnya tujuan dan prinsip dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Koordinasi, sebagai proses yang penting dalam mencapai tujuan bersama, dilakukan oleh seorang pimpinan dalam organisasi. Kewenangan yang dimiliki oleh Camat dapat disamakan dengan kewenangan delegatif.

Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, tujuan utama adalah untuk meningkatkan efektivitas Program Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Camat mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran No. KK.02.04/143-Kec/2023 tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bulanan antara lembaga Pemerintahan dan Unit-unit kerja kecamatan serta desa di wilayah tersebut. Rapat tersebut diharapkan menjadi forum silaturahmi antara Pemerintah Kecamatan dan unit-unit kerja kecamatan serta desa, tempat penyampaian informasi Pemerintahan dan pembangunan, serta monitoring pelaksanaan pembangunan dan kegiatan lainnya. Partisipasi aktif dari semua instansi diharapkan untuk memastikan informasi yang diperoleh peserta dapat disampaikan kembali kepada masyarakat dan pegawai di wilayah mereka, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efisien.

Meskipun pelaksanaan koordinasi di Kecamatan Pamulihan belum optimal, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain: padatnya kegiatan di unit-unit kerja kecamatan, kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan unit lain di wilayah tersebut, dan kurangnya ketegasan atau sanksi terkait ketidakhadiran unit kerja kecamatan dalam rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi, terdapat dua sesi, yakni sesi informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dari unit-unit kerja pemerintah tingkat kecamatan dan sesi tanya jawab.

Peserta rapat, termasuk Kepala Desa Garumukti dan Kepala Desa Pananjung, menekankan pentingnya penekanan pada pelaksanaan kebijakan koordinasi yang efektif dan komprehensif di tingkat kecamatan. Mereka menyatakan bahwa lembaga pemerintahan belum sepenuhnya memahami pentingnya koordinasi, sehingga efektivitas pencapaian program kerja pemerintah belum optimal. Mereka juga menyarankan agar pertemuan bulanan di Kecamatan Pamulihan dijadikan ajang silaturahmi yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan, karena kebutuhan dan permasalahan pemerintahan di desa memerlukan informasi, penjelasan, dan solusi dari unit-unit kerja kecamatan melalui rapat koordinasi ini.

Berdasarkan penelitian awal, beberapa fenomena problematis telah diidentifikasi, termasuk kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah kecamatan dengan lembaga/unit kerja pemerintahan tingkat kecamatan. Masalah tersebut disebabkan oleh komunikasi yang tidak optimal dan kurang terstruktur. Selain itu, manajemen pelaksanaan koordinasi tingkat kecamatan juga terganggu oleh kurangnya perencanaan yang baik. Jumlah peserta rapat koordinasi yang banyak menunjukkan perlunya Pemerintah Kecamatan untuk mengeluarkan arahan mengenai pelaksanaan kebijakannya melalui koordinasi dengan unit kerja pemerintah tingkat kecamatan dan lembaga pemerintahan tingkat kecamatan Pamulihan. Efektivitas program koordinasi juga dinilai kurang baik, terlihat dari kurangnya koordinasi yang efisien, motivasi lemah di lembaga, dan kurangnya responsivitas dari Satuan Kerja terkait.

## 2. Metodologi

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah teknik eksplanasi dengan analisis regresi variabel. Penelitian yang akan dilakukan dengan cara ini akan menggunakan satu variabel terikat, satu variabel terikat dan satu variabel terikat yang mempunyai hubungan sebab akibat yang efektif antar variabelnya. Sasaran populasi (sampel populasi) pada penelitian ini adalah 100 responden. Pengumpulan datanya dengan cara: studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu: Angket, Wawancara, dan Observasi. Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas Uji dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data dengan menggunakan Analisis Deskriptif dan Statistik

## 3. Hasil dan Pembahasan

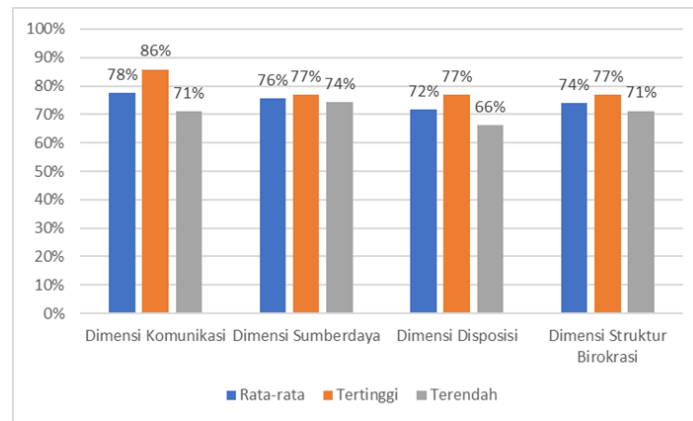
Untuk mengevaluasi status variabel pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, implementasi kebijakan pemerintahan kecamatan memainkan peran krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Kecamatan berfungsi sebagai sumber daya utama untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Di tingkat yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, kecamatan bertanggung jawab atas penyediaan layanan pokok seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan administrasi publik.

Berdasarkan data yang terkumpul mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di Pamulihan Kabupaten Garut, tanggapan rata-rata dari responden mencapai 73,93%, menandakan tingkat kualifikasi yang baik dengan skor sebesar 3,6967. Ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah di daerah tersebut telah diterapkan dengan baik. Namun, beberapa temuan menunjukkan adanya beberapa permasalahan, terutama terkait dengan kinerja kepolisian yang sedikit di bawah rata-rata.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa permasalahan terkait integrasi informasi keuangan yang belum optimal, kurangnya transparansi keuangan, dan belum efektifnya penerapan beberapa kebijakan.

Wawancara mengungkapkan bahwa interaksi antar pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan dilakukan melalui rapat koordinasi atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa interaksi antara pegawai dan camat terlihat cukup baik.

Indikator tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut adalah indikator sasaran kebijakan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh sarana prasarana yang baik. Namun, indikator terendah adalah laporan organisasi, menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut akan terpengaruh jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Dari penjelasan di atas, kurangnya intensitas implementasi kebijakan oleh pelaksana dapat mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan optimal diimplementasikan.



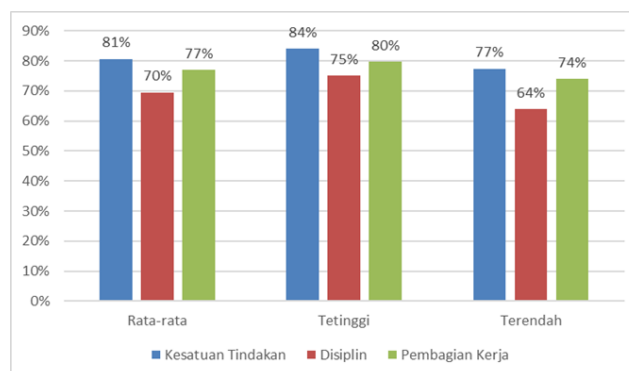
**Gambar 1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Kecamatan**

Dari gambar di atas bahwa dimensi yang nilainya paling tinggi adalah pada dimensi komunikasi dan indikator terendah ada pada dimensi disposisi, untuk lebih jelasnya penulis sajikan penjelasannya pada setiap dimensi di bawah ini.

Berdasarkan informasi yang diberikan mengenai koordinasi pemerintah daerah di wilayah Pamulihan Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 75,70% dari responden memberikan tanggapan yang baik dengan skor sebesar 3,7850, menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah daerah di Pamulihan Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mendekati dalam koordinasi pemerintah kecamatan di Pamulihan Kabupaten Garut adalah tingkat keluhan terhadap kualitas koordinasi, mencapai skor sebesar 84,00% dan tingkat 4.2000, menandakan tingkat koordinasi yang relatif baik.

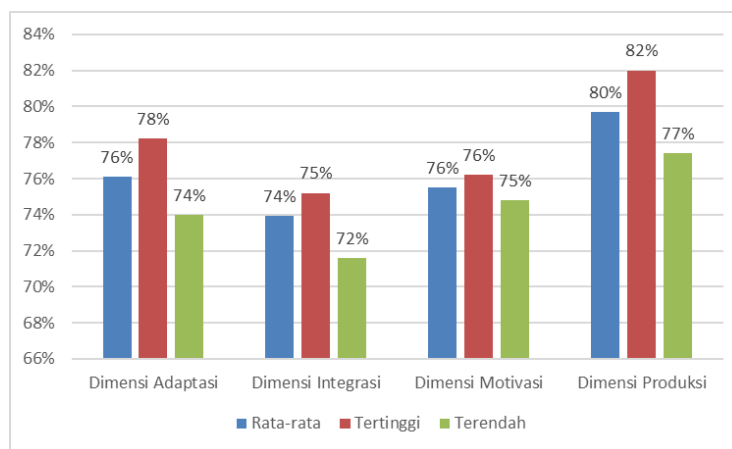
Namun demikian, koefisien determinasi untuk pemerintah kecamatan di wilayah Pamulihan Kabupaten Garut sebesar 64,00% dengan nilai yang dianggap sangat baik, yaitu 3,2000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di kecamatan Kabupaten Pamulihan telah berkinerja dengan baik. Informasi lebih lanjut terkait dengan variabel koordinasi pemerintah kecamatan dijabarkan dalam grafik yang disajikan di bawah ini.



**Gambar 2. Variabel Koordinasi Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut**

Sedangkan untuk melihat hasil dari per dimensi dari variabel koordinasi pemerintah kecamatan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut penulis sajikan dibawah ini. Berdasarkan informasi yang diberikan mengenai efektivitas program kerja sama dengan instansi pemerintah di Pamulihan Garut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tanggapan responden adalah 76,04%, menunjukkan bahwa efektivitas program telah baik di Pamulihan Garut.

Selanjutnya, dari data tersebut, indikator yang paling signifikan dalam efektivitas program kerja organisasi pemerintah di Pamulihan Garut adalah jumlah penyelesaian pekerjaan yang terkoordinasi, mencapai skor rata-rata sebesar 82,00% dengan standar deviasi sebesar 4,1000, menunjukkan tingkat efektivitas program yang relatif tinggi. Sementara itu, koefisien efektivitas program kerja instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Pamulihan Garut adalah indikator komunikasi dengan organisasi lain, dengan persentase sebesar 71,60%.



**Gambar 3. Variabel Efektivitas Pencapaian Program Kerja Lembaga Pemerintah di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut**

Sedangkan hasil uji statistik dari penelitian ini adalah:

**Tabel 1. Hasil Uji Pengaruh**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.288	1.699		5.466	.000
	Kebijakan Pemerintah Kecamatan	1.317	.109	.763	12.121	.000
	Koordinasi Pemerintah Kecamatan	.177	.096	.115	1.833	.007

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencapaian Program Kerja

**Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	985.601	2	492.801	82.050	.000 <sup>b</sup>
	Residual	582.589	97	6.006		
	Total	1568.190	99			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencapaian Program Kerja  
b. Predictors: (Constant), Koordinasi Pemerintah Kecamatan, Kebijakan Pemerintah Kecamatan

**Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 <sup>a</sup>	.628	.621	2.45073

a. Predictors: (Constant), Koordinasi Pemerintah Kecamatan, Kebijakan Pemerintah Kecamatan

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan uji melalui analisis jalur (*path analysis*) yang disajikan dalam diagram jalur. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi kebijakan pemerintah daerah dengan organisasi eksternal memiliki dampak positif terhadap efektivitas program kerja pemerintah daerah di Pamulihan Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan uji F serta T untuk menguji variabel terikat efektivitas program kerja pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas program, sedangkan koordinasi kebijakan pemerintah daerah dengan organisasi eksternal juga memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 62,80% variasi efektivitas program dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan kepuasannya terhadap upaya implementasi kebijakan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi eksternal di Pamulihan Kabupaten Garut.

#### 4. Kesimpulan

Dari tinjauan literatur mengenai dampak implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap koordinasi kebijakan pemerintah daerah dengan organisasi eksternal di Pamulihan Kabupaten Garut, sudah dilakukan berdasarkan kriteria yang ketat. Meskipun pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Pamulihan Kabupaten Garut cenderung baik, terdapat kecenderungan praktik kerja organisasi di bawah standar. Koordinasi antara pemerintah kecamatan dan lembaga eksternal di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut menunjukkan kesadaran yang baik, namun masih terdapat kendala pada jumlah pelaksanaan koordinasi yang dianggap masih berat dan efektivitas Program Kerja Lembaga Pemerintah di Pamulihan Kabupaten Garut menunjukkan bahwa program tersebut memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, tingkat kepuasan terhadap komunikasi dengan organisasi lain masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian berbasis hipotesis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap koordinasi antara pemerintah daerah dengan

organisasi eksternal dan efektivitas program kerja pemerintah daerah di Kabupaten Pamulihan. Hal ini ditunjukkan oleh Koefisien determinasi yang menegaskan pengaruh yang besar terhadap koordinasi dan efektivitas program kerja pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

- A.Rahmawati. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas*. 15–24.
- Ali, J., & Faroji, R. (2021). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*. *Jurnal Neraca Peradaban*, 1(2), 128–135.
- Astuti, E., Suhartono, & Syahyuti. (2015). *Collaboration among Local Government, Community, and Non-governmental Organizations in Policy Implementation (Study in Panggul Sub-District, Trenggalek Regency)*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 108-120
- Aziz, M. A. (2021). Efektivitas Komunikasi Interpersonal di Optik Yauri (Studi Kasus Dalam Analisis Islamic Studies di Optik Yauri Medan Marelan). *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(September), 236–246.  
<http://jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/84%0Ahttps://jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attaqwa/article/download/84/164>
- Bulele, Y., Pangkey, M., & ... (2019). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu .... *Jurnal Administrasi* ..., 2(2), 487–499.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/6544/6068>
- Daga, R., Ismail, N., & Maddatuang, B. (2020). Analisis Efektivitas Program Mandiri Dagang Untung pada PT . Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kanwil Regional X Sulawesi dan Maluku. *SEIKO: Journal Pf Management & Business*, 3(3), 65–78.  
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/727/434>
- Danim, Sudarwan, (2017). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta
- Edward, G. I. (2017) *Implementing Public Policy*. Washington: CongressionalQuarterly Press
- Ihsan, H. N. (2020). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Terhadap Kinerja Pembinaan ORMAS Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan ORMAS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut*. In *Universitas Garut*. Universitas Garut.
- Jatmiko, A. (2019). Peran Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. *Administrasi Publik*, 1(1), 288–304.  
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/AP/article/view/4573>
- Jehdeng, F. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang Samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan*.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi danEvaluasi*. Jakarta: PT Gramedia
- Nugraha, M. E. S. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten barito selatan. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 82–90.  
<https://doi.org/10.103084/restorica.v6i2.1781>
- Nugraha, A., & Wulandari, D. (2019). The Implementation of Village Fund Policy: A Study on the Quality of Public Services and Development in Bogor Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1), 53-66
- Rudiwan, (2007), Skala pengukuran variable-variabel penelitian, Alfabeta :Bandung
- Parid, M. T. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Terhadap Kinerja Koordinasi UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 15(2), 90-99.
- Patel. (2019). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 9–25.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rosadi, I. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Studia Administrasi*, 3(1), 4–14.  
<https://doi.org/10.47995/jian.v3i1.47>
- Sanjiwani, I. G. A. M. (2022). Strategi Bertahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Ancak Restaurant. *Jurnal ALTASIA*, 4(1), 18–27.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Steers, Richard.M (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah PeriLaku, Jakarta,Erlangga
- Umiyah, Fitrayadi Sugiana, D., & Lestari Yuni, R. (2023). Pelestarian Kesenian Tari Buaya Putih Sebagai Upaya Menjaga Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Bina Gogik*, 10(1), 125–136.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Utami, D., & Nugraha, A. (2018). *Community Empowerment through Village Funds Policy: The Role of Decentralization, Community Participation, and Public Service Quality*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*
- Wardani, S. M., & Putrantonono, A. H. (2023). Dalam Pengelolaan Data Pns Di Ajen Akmil Program Studi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang Program Studi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang Datatable Application-Based Performance Optimization Towards Pns Data Management At. *Dwija Kusuma*, 11(1), 81–92.
- Winarno Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta: Media Presindo.
- Yuliani, F. (2015). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi pada Tanaman Pangan di Kabupaten Rokan Hilir. *Spirit Publik*, 10(1), 1103–162.  
<https://scholar.archive.org/work/pia2tmx6mnbjck5yr3pr3zgsq/access/wayback/https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/908/876>

Zurriyatul Husna, & Mayarni, M. (2022). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia) Melalui Oase (Online Anywhere Service) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 106–115. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.676>.